

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Perubahan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 19 September 2025  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681210 1990001 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia .....	17
2.1.2.2 Asset/modal .....	18
2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.1.2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	20
2.1.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	21
2.1.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	21
2.1.2.7 Kelompok Sasaran Layanan.....	21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.2.2 Isu Strategis .....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ....	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 .....	24
3.2 Strategi.....	26
3.3 Arah Kebijakan .....	27
3.4 Manajemen Resiko strategi Perangkat Daerah.....	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	31
BAB V PENUTUP.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	17
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	18
Tabel 2.3 Capaian Indikator SPM Sesuai Tupoksi.....	20
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Tupoksi.....	20
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi.....	21
Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis .....	23
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	25
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung .....	26
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	28
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	32
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	43
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	87
Tabel 4.4 Rancangan renstra Telah Mengakomodir Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi.....	89
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	89
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.....	90
Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 .....	16
Gambar 3.1 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 .....	24
Gambar 3.2 1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	25
Gambar 4.1 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

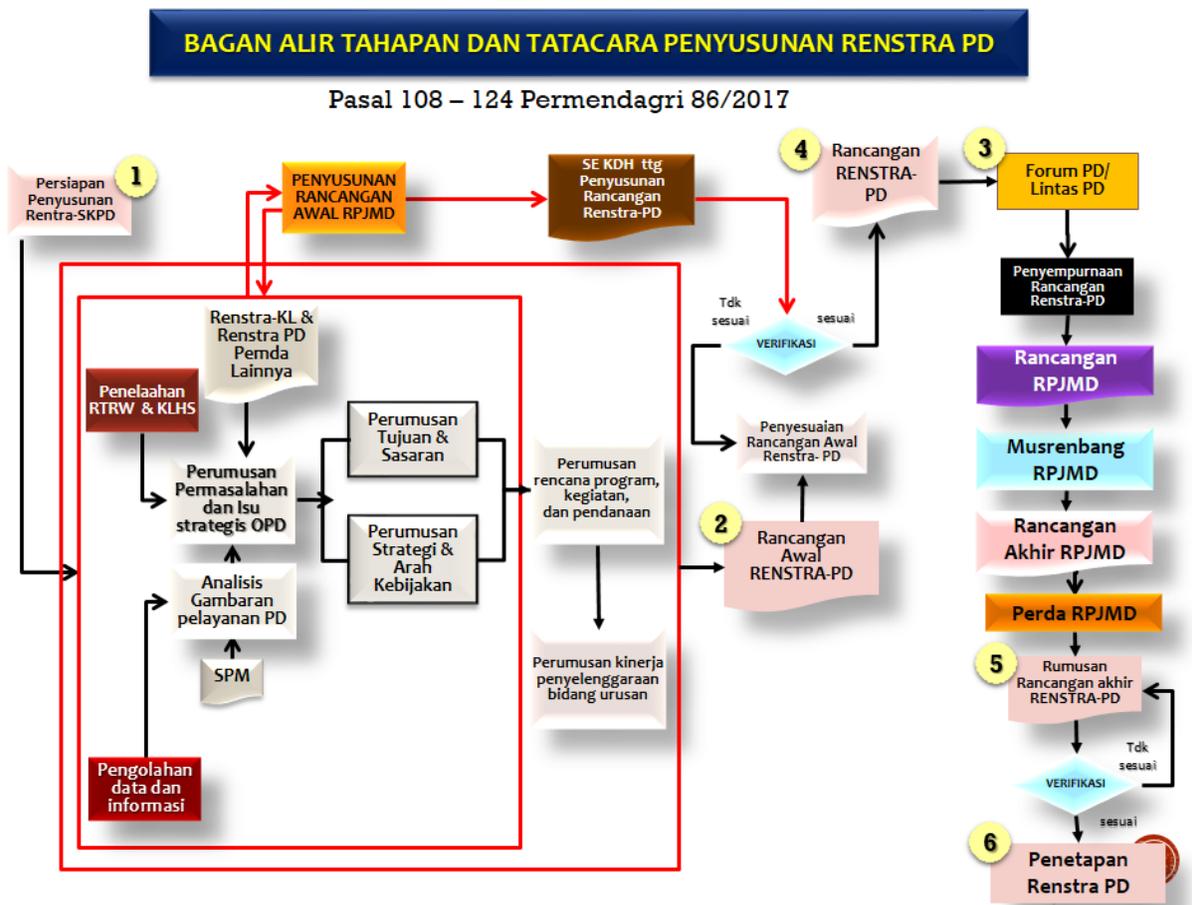
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan pendukung urusan pemerintahan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariaan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif,

setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik, dan adanya rasa aman.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang

didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasikal, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah berikut :

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
  - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
  - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
  - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
  - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
  - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
  - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber daya perangkat daerah;

c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah).

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
  - b. Isu strategis

### BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

### BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program;
2. Uraian kegiatan;
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah;
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

## BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

###### **2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## 2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tenaga ahli fraksi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan fasilitasi fraksi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan publikasi;

- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan keprotokolan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP, pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan perencanaan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan laporan kinerja dan anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rapat dan perundang-undangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan fasilitasi penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengoordinasian pembahasan Raperda;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi penyelenggaraan rapat/persidangan;

- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyiapan proses pengambilan Sumpah dan Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas kegiatan pendamping Alat Kelengkapan DPRD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a. Sekretaris

b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.

c. Bagian Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub Koordinator Akuntansi; dan
3. Sub Koordinator Perbendaharaan.

d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

1. Sub Koordinator Rapat dan Risalah;
2. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-Undangan; dan
3. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.

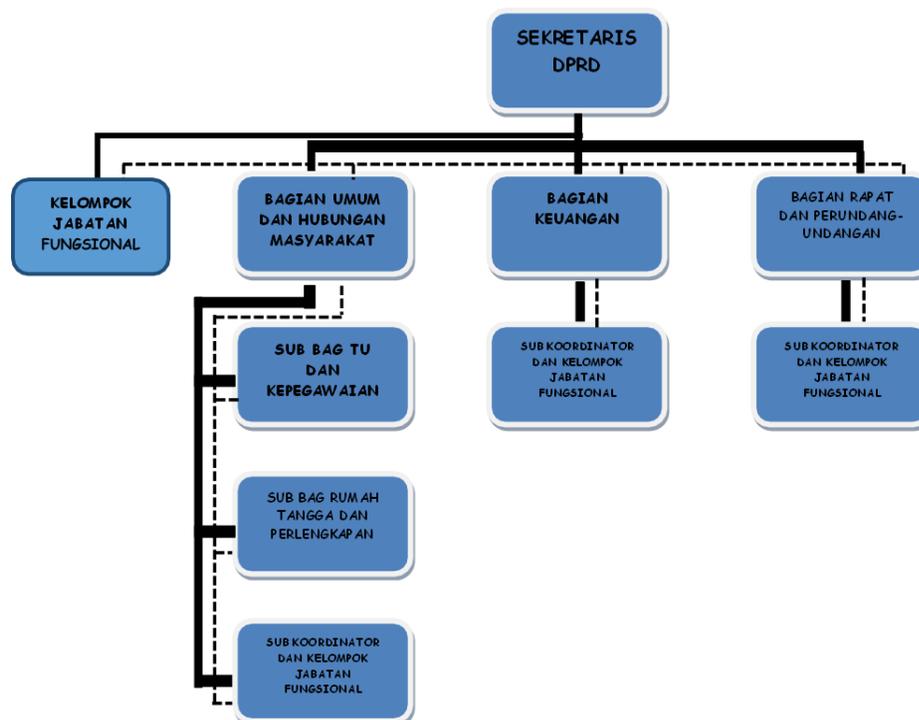
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
2. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian yang bersangkutan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

#### **2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung:



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung  
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022

## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)						GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 1</b>															

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 2</b>						1					1		1		
<b>Eselon 3</b>															
<b>Kabag</b>						3					1				2
<b>Eselon 4</b>						1					1				
Ksb RT dan perlengkapan						1					1				1
<b>Non Eselon</b>															
Pengadministrasi keuangan	1									1					
<b>Pengelola sarana dan prasarana kantor</b>	1									1					
Pengola kepegawaian					1					1					
<b>Perancang peraturan Perundang-undangan</b>					1					1					
Pengadministrasian Hukum					1					1					
<b>Pengelola media cetak</b>					1					1					
Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan	1								1						
<b>Pengadminis trasian Kepegawaian</b>	1								1						
Bendahara				1					1						
<b>Verifikator Keuangan</b>				1					1						
Arsiparis Terampil				1					1						
Arsiparis				1					1						
Pramu Bakti	2								2						

### 2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan

dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Temanggung**

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000 M <sup>2</sup>	598.400.000	Baik
	Tanah Lapangan Parkir Konblok	4.019 M <sup>2</sup>	601.600.000	Baik
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1.414 M <sup>2</sup>	314.000.000	Baik
2.	Gedung			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.000 M <sup>2</sup>	2.209.330.199,94	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	200 M <sup>2</sup>	231.839.917,81	Baik
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1.414 M <sup>2</sup>	284.700.000	Baik
	Gedung untuk Pos jaga Permanen	12 M <sup>2</sup>	16.768.080	Baik
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.500 M <sup>2</sup>	3.478.106.385	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	195 M <sup>2</sup>	562.653.265	Baik
3.	Alat-Alat Angkutan			
	Kendaraan Roda 4	16 Unit	3.595.682.000	Baik
	Kendaraan Roda 2	16 Unit	216.274.150	Baik
4.	Alat-Alat Perkantoran			
	Personal Computer (PC)	34 Unit	243.856.650	Baik
	Laptop	58 Unit	235.230.628,57	Baik
	Printer	48 Unit	79.736.500	Baik
	Hard Disk Eksternal	12 Unit	11.412.750	Baik
	LCD Proyektor	16 Unit	43.935.000	Baik
	Scanner	4 Unit	25.025.000	Baik

	Mesin Fotocopy	2 Unit	172.890.450	Baik
	Mini Komputer Kiosk	1 Unit	12.000.000	Baik

### 2.1.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

### 2.1.2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Tabel 2.3**  
**(Capaian indikator SPM sesuai tupoksi)**

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rata-rata capaian indikator SPM sudah memenuhi target. Realisasi persentase Raperda yang disahkan tepat waktu pada Tahun 2022 tidak mencapai target 100% karena terdapat PERDA yang diajukan tidak ditetapkan tepat waktu. Persentase jumlah Peraturan Daerah Inisiatif terhadap jumlah Raperda pada tahun 2021 sebesar 0% karena Raperda inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya pada Tahun 2021 tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan Raperda inisiatif.

### 2.1.2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Tabel 2.4**  
**(Capaian indikator kinerja utama sesuai tupoksi)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	n.a	n.a	n.a	n.a	100	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa capaian Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Tahun 2024 yaitu 100%, sedangkan pada Tahun 2020-2023 belum dihitung. Sehingga capaian dari tahun 2020-2024 tidak dapat dibandingkan.

### 2.1.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**Tabel 2.5**  
**(Capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi)**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
		NIHIL					

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi pada Sekretariat DPRD adalah nihil.

### 2.1.2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima

manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut ini merupakan kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat DPRD :

1. Perangkat Daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia Usaha; dan
4. Akademisi.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas DPRD;
4. Belum optimalnya layanan administrasi DPRD;
5. Belum seluruhnya kebutuhan rumah tangga DPRD terfasilitasi.

### 2.1.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Permasalahan dan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor</li> <li>2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas DPRD</li> <li>4. Belum optimalnya layanan administrasi DPRD</li> <li>5. Belum seluruhnya kebutuhan rumah tangga DPRD terfasilitasi</li> </ol>	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang akuntabel	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sitem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Layanan Sekretariat terhadap DPRD</li> <li>2. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD</li> <li>3. Peningkatan Pemenuhan Fasilitas Kapasitas DPRD</li> </ol>

### BAB III

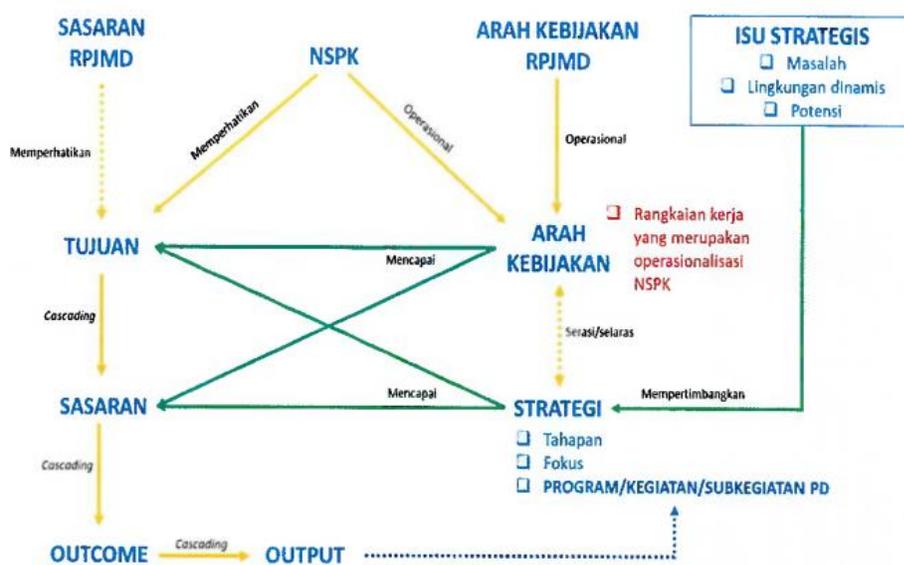
## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

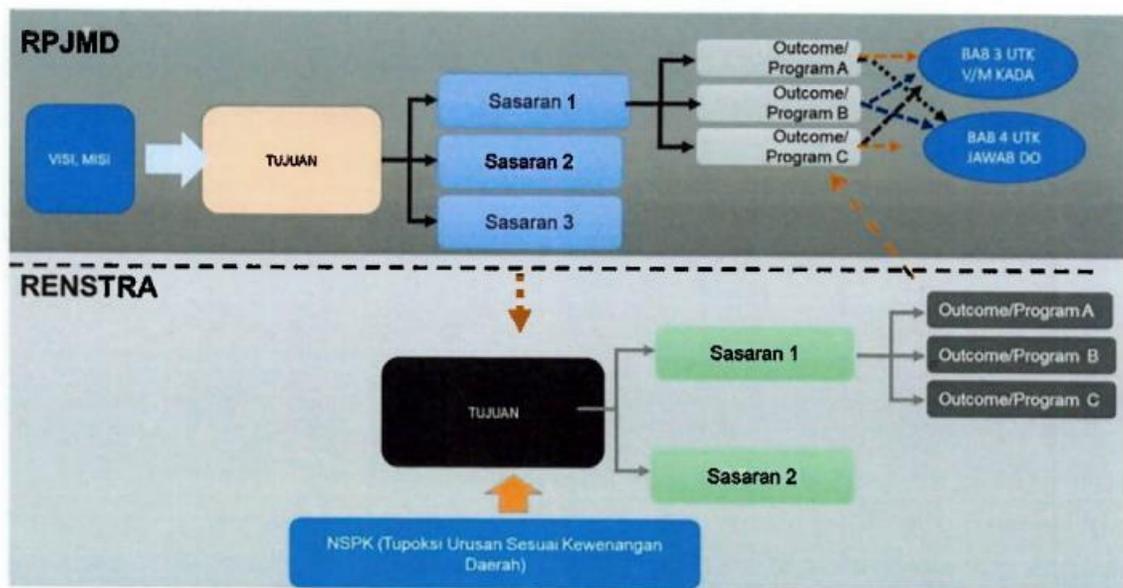
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Temanggung**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekrretariat DPRD(Angka)	85	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD(%)	80	83	86	86	90	95	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah ( Angka )	0	80	81	82	83	85	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,9	71,1	71,8	72,1	72,8	73,1	

Ket :

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

### **3.2 Strategi**

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Identifikasi Kebutuhan Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kualitas Layanan	Perwujudan Pelayanan yang Optimal
Penataan Internal	Digitalisasi Dasar	Integrasi dan Kolaborasi	Inovasi Layanan	Transformasi Layanan dari Media Konvensional Menjadi Media Digital
Penguatan Dasar Teknis dan Internal	Keselarasan Dokumen	Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebagai Alat Perbaikan	Peningkatan LKjIP dengan Pembanding Eksternal	Memastikan Keberlanjutan dan Replikasi Praktik Terbaik

### **3.3 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten**  
**Temanggung**

<b>No</b>	<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan berbasis kinerja</li> <li>• Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</li> <li>• Implementasi manajemen resiko dalam perencanaan</li> </ul>	
		2. Peningkatan keterbukaan publik	2. Peningkatan standar pelayanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi</li> </ul>	
		3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik</li> <li>• Peningkatan sarana dan</li> </ul>	3. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD <p>a. pengembangan inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan proses dan inovasi pelayannya</li> <li>• Optimalisasi peran perangkat daerah dalam</li> </ul>	

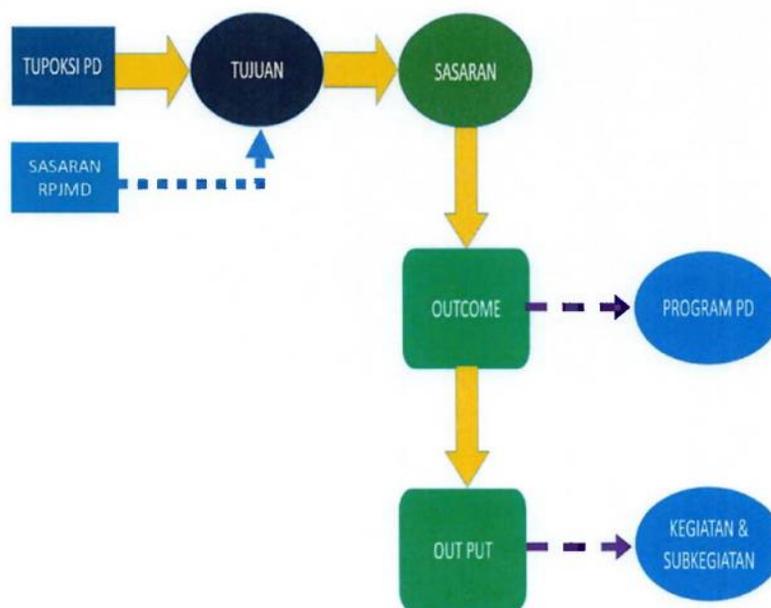
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Keterangan
		<p>prasarana pendukung pelayanan public</p>	<p>menciptakan dan mengelola inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi pelayan</li> </ul> <p>b. Peningkatan kompetensi SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan partisipasi dan kepuasan masyarakat pelayanan</li> <li>• Penguatan pengawasan dan pengaduan layanan</li> <li>• Penerapan Zona Integrasi menuju WBK dan WBBM</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan</li> </ul>	

### **3.4 Manajemen Resiko strategi Perangkat Daerah**

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencanan komunikasi. Proses manajemen resiko dalam penyusunan Sekretraiat DPRD dilakukan pada konteks strategis dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan dengan proses manajemen resiko pada konteks resiko strategis yang hasilnya sebagai berikut terlampir.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Perangkat Daerah

*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025*

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4



**Tabel 4.1****Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD				Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD (Angka)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal			Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)		
			Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Laporan Pembahasan Kebijakan anggaran (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian pereaturan perundang-undangan		Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Jumlah Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi ( dokumen )	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
				Jumlah Fasilitasi Kegiatan kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Jumlah Dokumen Penyusunan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses			
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)		
							Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen))	4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	

<b>NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				49.650.573.421		49.935.795.215		50.701.886.403		52.036.310.105		51.924.687.821
<b>ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				32.790.216.758		33.063.636.302		33.595.204.481		34.608.022.563		34.484.200.478
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	<b>Persentase ketersediaan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	32.790.216.758	<b>100</b>	33.063.636.302	<b>100</b>	<b>33.595.204.481</b>	<b>100</b>	34.608.022.563	<b>100</b>	34.484.200.478
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123
Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123		2.888.934.123
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123	<b>25</b>	2.888.934.123
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.333.687		438.333.687		609.289.152		903.173.894		805.865.720

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	10	370.333.687	10	438.333.687	10	609.289.152	10	903.173.894	10	805.865.720
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60		60		60					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12					
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000		7.000.000		18.000.000		41.000.000		41.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	5.000.000	12	7.000.000	12	18.000.000	12	41.000.000	12	41.000.000
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kan				20.000.000		22.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		22.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	22.000.000	12	30.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000		27.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	10	25.000.000	10	27.000.000	10	35.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.000.000		110.000.000		150.000.000		210.000.000		210.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.000.000	12	110.000.000	12	150.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.333.687		250.333.687		351.289.152		507.173.894		409.865.720
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60	200.333.687	60	250.333.687	60	351.289.152	60	507.173.894	60	409.865.720
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000		100.000.000		130.000.000		200.000.000		200.000.000
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	130.000.000	2	200.000.00	2	200.000.000
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		100.000.000		130.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	130.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				810.000.000		855.000.000		955.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	810.000.000	12	855.000.000	12	955.000.000	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12			
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		15.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		120.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.000.000		720.000.000		780.000.000		800.000.000		800.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	12	720.000.000	12	780.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				470.000.000		531.324.987		670.324.987		815.324.987		814.324.987
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	10	10		10		10		10		10	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	470.000.000	30	531.324.987	30	670.324.987	30	815.324.987	30	814.324.987
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	2	2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20		20		20		20		20	
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		330.000.000		390.000.000		450.000.000		450.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30	300.000.000	30	330.000.000	30	390.000.000	30	450.000.000	30	450.000.000
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000	92	85.000.000	95	100.000.000	98	150.000.000	100	150.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	70.000.000	2	85.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				80.000.000		90.000.000		150.000.000		180.000.000		180.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	80.000.000	10	90.000.000	10	150.000.000	10	180.000.000	10	180.000.000
4.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		26.324.987	95	30.324.987	98	35.324.987	100	34.324.987
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	20.000.000	20	26.324.987	20	30.324.987	20	35.324.987	20	34.324.987
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				27.691.648.948		27.730.043.505		27.801.656.219		28.170.589.559		28.145.075.648
Jumlah Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45	27.691.648.948	45	27.730.043.505	45	27.801.656.219	45	28.170.589.559	45	28.145.075.648
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	45	45		45		45		45			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kuangan DPRD (Orang/Bulan)											
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	45	45		45		45		45		45	
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				27.063.948.448		27.092.343.005		27.133.955.719		27.474.889.059		27.449.375.148
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	27.063.948.448	45	27.092.343.005	45	27.133.955.719	45	27.474.889.059	45	27.449.375.148
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				542.000.000		552.000.000		582.000.000		610.000.000		610.000.000
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	45	45	542.000.000	45	552.000.000	45	582.000.000	45	610.000.000	45	610.000.000
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRDr				85.700.500		85.700.500		85.700.500		85.700.500		85.700.500
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45	85.700.500	45	85.700.500	45	85.700.500	45	85.700.500	45	85.700.500
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				509.300.000		520.000.000		540.000.000		580.000.000		580.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	-	0		0		0		1		0	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	509.300.000	12	520.000.000	12	540.000.000	12	580.000.000	12	580.000.000
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0		0		0		50.000.000		0
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	-	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				89.300.000		100.000.000		120.000.000		110.000.000		160.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	12	89.300.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	110.000.000	12	160.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	12	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.860.356.663		16.872.158.913		17.106.681.922		17.428.287.542		17.440.487.343
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD (%)	0	90	8.430.178.331	92	8.436.079.456	95	8.553.340.961	98	8.714.143.771	100	8.720.243.671
	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran (%)	0	90		92		95		98		100	
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.750.657.444		2.755.756.319		2.872.668.606		2.750.865.795		3.025.765.894
Jumlah Dokumen Penyusunan Penyerapan dan Penggimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	2.750.657.444	2	2.755.756.319	2	2.872.668.606	2	2.750.865.795	2	3.025.765.894
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3		3		3		3		3	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				110.164.800		111.164.800		117.164.800		127.164.800		127.164.800
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	2	110.164.800	2	111.164.800	2	117.164.800	2	127.164.800	2	127.164.800
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.640.492.644		2.644.591.519		2.755.503.806		2.623.700.995		2.898.601.094
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	2.640.492.644	3	2.644.591.519	3	2.755.503.806	3	2.623.700.995	3	2.898.601.094
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				5.679.520.887		5.680.323.137		5.680.672.355		5.963.277.976		5.694.477.777
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60	60	5.679.520.887	60	5.680.323.137	60	5.680.672.355	60	5.963.277.976	60	5.694.477.777
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				5.679.520.887		5.680.323.137		5.680.672.355		5.963.277.976		5.694.477.777
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60	60	5.679.520.887	60	5.680.323.137	60	5.680.672.355	60	5.963.277.976	60	5.694.477.777
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian	Persentase jumlah rancangan Peraturan	100	100	8.430.178.332	100	8.436.079.457	100	8.553.340.961	100	8.714.143.771	100	8.720.243.672

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
peraturan perundang- undangan	Daerah yang dibahas (%)											
	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (%)	100	100			100	100			100	100	
	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan (%)	100	100			100	100			100	100	
	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana (%)	100	100			100	100			100	100	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5.548.395.732		5.550.296.857		5.655.558.361		5.864.361.171		5.702.461.072
Jumlah Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	10	10			10	10			10	10	
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	5	5	5.548.395.732		5	5.550.296.857		5	5.655.558.361	5.864.361.171	5.702.461.072
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	17	17			17	17			17	17	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1.757.691.832		1.757.592.957		1.732.854.461		1.961.657.271		1.679.757.172
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	17	17	1.757.691.832	17	1.757.592.957	17	1.732.854.461	17	1.961.657.271	17	1.679.757.172
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				2.535.174.300		2.536.174.300		2.561.174.300		2.551.174.300		2.611.174.300
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	5	5	2.535.174.300	5	2.536.174.300	5	2.561.174.300	5	2.551.174.300	5	2.611.174.300
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				1.255.529.600		1.256.529.600		1.361.529.600		1.351.529.600		1.411.529.600
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)	10	10	1.255.529.600	10	1.256.529.600	10	1.361.529.600	10	1.351.529.600	10	1.411.529.600
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				592.782.600		596.782.600		608.782.600		568.782.600		728.782.600
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	592.782.600	1	596.782.600	1	608.782.600	1	568.782.600	1	728.782.600

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				191.517.800		192.517.800		196.517.800		186.517.800		226.517.800
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	191.517.800	1	192.517.800	1	196.517.800	1	186.517.800	1	226.517.800
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				198.239.800		199.239.800		203.239.800		193.239.800		233.239.800
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	198.239.800	1	199.239.800	1	203.239.800	1	193.239.800	1	233.239.800
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				101.927.500		102.927.500		104.927.500		94.927.500		134.927.500
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	101.927.500	1	102.927.500	1	104.927.500	1	94.927.500	1	134.927.500

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				101.097.500		102.097.500		104.097.500		94.097.500		134.097.500
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	101.097.500	1	102.097.500	1	104.097.500	1	94.097.500	1	134.097.500
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				184.000.000		184.000.000		184.000.000		176.000.000		184.000.000
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	20	20	184.000.000	20	184.000.000	20	184.000.000	20	176.000.000	20	184.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	22	22		22		22		22			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	20	20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	20	20		20		20		20			
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan				44.000.000		44.000.000		46.000.000		44.000.000		46.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum												
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	20	20	44.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				44.000.000		44.000.000		46.000.000		44.000.000		46.000.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	20	20	44.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				44.000.000		44.000.000		46.000.000		44.000.000		46.000.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	20	20	44.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000	20	44.000.000	20	46.000.000
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				52.000.000		52.000.000		46.000.000		44.000.000		46.000.000
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	22	22	52.000.000	22	52.000.000	22	46.000.000	22	44.000.000	22	46.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)											
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				2.105.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12	2.105.000.000	12	2.105.000.000	12	2.105.000.000	12	2.105.000.000	12	2.105.000.000
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	-	0		0		0		1		0	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6	
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0		0		0		500.000.000		0
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	-	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	2.000.000.000	6	2.000.000.000	6	2.000.000.000	6	1.500.000.000	6	2.000.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET.
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
1	1	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi							
1	1	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	<b>16.860.356.663</b>	<b>16.872.158.913</b>	<b>17.106.681.922</b>	<b>17.428.287.542</b>	<b>17.440.487.343</b>	
			<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.750.657.444</b>	<b>2.755.756.319</b>	<b>2.872.668.606</b>	<b>2.750.865.795</b>	<b>3.025.765.894</b>	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	110.164.800	111.164.800	117.164.800	127.164.800	127.164.800	
			Pelaksanaan Reses	2.640.492.644	2.644.591.519	2.755.503.806	2.623.700.995	2.898.601.094	
			<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>5.679.520.887</b>	<b>5.680.323.137</b>	<b>5.680.672.355</b>	<b>5.963.277.976</b>	5.694.477.777	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.679.520.887	5.680.323.137	5.680.672.355	5.963.277.976	5.694.477.777	
			<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>5.548.395.732</b>	<b>5.550.296.857</b>	<b>5.655.558.361</b>	<b>5.864.361.171</b>	<b>5.702.461.072</b>	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.757.691.832	1.757.592.957	1.732.854.461	1.961.657.271	1.679.757.172	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.535.174.300	2.536.174.300	2.561.174.300	2.551.174.300	2.611.174.300	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1.255.529.600	1.256.529.600	1.361.529.600	1.351.529.600	1.411.529.600	
			<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>592.782.600</b>	<b>596.782.600</b>	<b>608.782.600</b>	<b>568.782.600</b>	<b>728.782.600</b>	
			Pembahasan KUA dan PPAS	191.517.800	192.517.800	196.517.800	186.517.800	226.517.800	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	198.239.800	199.239.800	203.239.800	193.239.800	233.239.800	
			Pembahasan APBD	101.927.500	102.927.500	104.927.500	94.927.500	134.927.500	
			Pembahasan APBD Perubahan	101.097.500	102.097.500	104.097.500	94.097.500	134.097.500	

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDANAAN					KET.
				PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>184.000.000</b>	<b>184.000.000</b>	<b>184.000.000</b>	<b>176.000.000</b>	<b>184.000.000</b>	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.000.000	44.000.000	46.000.000	44.000.000	46.000.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	44.000.000	46.000.000	44.000.000	46.000.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	44.000.000	46.000.000	44.000.000	46.000.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	52.000.000	46.000.000	44.000.000	46.000.000	
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.105.000.000</b>	<b>2.105.000.000</b>	<b>2.105.000.000</b>	<b>2.105.000.000</b>	<b>2.105.000.000</b>	
			Orientasi DPRD	0	0	0	500.000.000	0	
			Pendalaman Tugas DPRD	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<b>TOTAL</b>									

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD yang membantu dalam proses pelaksanaan tugas DPRD dalam melaksanakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah seperti pembuatan peraturan perundang-undangan, anggaran dan pengawasan.

Tabel 4.4  
Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NIHIL				

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tidak terdapat Program Delegasi Kabupaten dari Provinsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung .

Tabel 4.5  
**Indikator Kinerja Utama**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Angka	85	86	87	88	89	90	
2.	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	80	83	86	86	90	95	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2025-2029 dengan target 100% per tahunnya.

Tabel 4.6  
 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Sekretariat DPRD tiak terdapat Indikator Kunci.

**TABEL 4.7**  
**DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel 4.7. bahwa Program Strategis Nasional untuk Sekretariat DPRD tidak mengampu sehingga nihil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat DPRD. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Sekretaris DPRD

Kabupaten Temanggung

**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001